

Ma'rifat Marjani Sebagai Salah Seorang Pendiri Provinsi Riau

Bunari¹

Abstrak: The purpose of this research is to observe the struggle of Ma'rifat Marjani which is the only one of Riau people who sat at Parliament from Paerti Party by not forgetting other personages' struggle. The result of this struggle was Undang-Undang Darurat No. 19/ 1957 about formation of territory Suatantara in West Sumatra, Jambi, Riau by central government which the first governor was Mr. S. M Amin and the capital city was in Tanjung Pinang.

Keyword : Founder, Perti

Pendahuluan

Sebelum perang dunia kedua daerah Riau hingga awal permulaan revolusi kemerdekaan terdiri dari kesatuan-kesatuan hukum, di mana Riau telah mempunyai pemerintah otonomi yaitu di bawah kekuasaan kerajaan Siak Sri Indrapura. Mereka kehilangan hak-haknya di dalam Sumatera Tengah. Dengan adanya Undang-Undang No. 10/1948 bahwa penggabungan daerah-daerah Keresidenan Riau, Jambi, dan Sumatera Barat ke dalam satu provinsi yaitu Sumatera Tengah.

Penggabungan Provinsi Riau di dalam Sumatera Tengah dirasakan sebagai suatu tindakan untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dirasakan masyarakat Riau. Seperti menghilangkan faktor-faktor historis yang melekat pada masyarakat daerah terutama pengaruh kesultanan dan raja-raja Rau menjadi empat kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Indragiri, Kabupaten Bengkalis, dan Kabupaten Kepulauan Riau. Pekanbaru dimasukan Kabupaten Kampar dengan maksud menghilangkan pengaruh historis Kerajaan Siak Sri Indrapura. Hal-hal baru yang diterapkan bukan dianggap sebagai binaan untuk masyarakat Riau, sebaliknya hal itu merupakan penghancuran dari masyarakat hukum yang telah ada karena pusat Provinsi Sumatera Tengah berada di Sumatera Barat. Perlakuan keadian yang tidak merata hingga

¹ Penulis adalah Staf Pengajar pada Program Studi Pendidikan Sejarah di Universitas Riau

dengan sendirinya orang-orang yang duduk di pusat provinsi ialah tokoh-tokoh dari Sumatera Barat. Di sinilah letak pangkal timbulnya ketidak seimbangan dalam penetaan ketiga daerah yang disatukan itu, karena tiap daerah mempunyai latar belakang sejarah dan pandangan hidup yang berbeda-beda. Jabatan-jabatan kunci Riau telah diambil alih oleh tenaga-tenaga pusat Provinsi Sumatera Barat, seperti Bupati, Wedana, kepala kantor dan jabatan-jabatan inti setingkat Camat yang ada di Kepulauan Riau.

Untuk memperbaiki keadaan masyarakat, maka tokoh-tokoh masyarakat Riau mulai membicarakan masalah ini untuk mencari jalan keluarnya. Perjuangan ini bukan berarti perjuangan untuk memecah belah bangsa Indonesia tetapi merupakan suatu keinginan untuk memperoleh kemajuan yang seimbang dengan suku bangsa lainnya, dan yang utama supaya keharmonisan antara daerah Sumatera Tengah dapat digalang. Penyampaian aspirasi secara wajar ke pusat tidak mendapat sambutan sebagaimana yang diharapkan dan selalu diterima dengan buruk sangka. Pendekatan-pendekatan yang diusahakan nampaknya tidak memberikan hasil, oleh karena itu timbullah ide untuk memisahkan daerah Riau dari Provinsi Sumatera Tengah. Ide ini sifatnya berpencar-pencar belum ada kebulatan tetapi dalam masyarakat Riau sendiri tidak ada yang menentang. Perjuangan ini berlangsung beberapa tahun dan pada puncaknya dilakukan Kongres Rakyat Riau di Pekanbaru pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1956. Kongres ini diprakarsai oleh tokoh-tokoh masyarakat Riau yang membentuk suatu kepanitiaan bernama Panitia Persiapan Provinsi Riau (P3R). Peserta kongres terdiri dari semua pemuka masyarakat dari seluruh kabupaten dalam Provinsi Riau yang berada di Pekanbaru.

Pada sidang kongres hari pertama Gubernur Sumatera Tengah, Ruslan Abdul Gani memberikan sambutan yang isinya, sebuah sokongan dan dorongan bagi masyarakat Riau. Padahal sebelumnya gubernur termasuk salah seorang yang tidak menyetujui Provinsi Sumatera Tengah dipecah. Dukungan ini terlihat dari kata sambutannya yang diantaranya ia mengatakan:

“Bila Provinsi Sumatera Tengah dipertahankan seperti sekarang ini maka daerah-daerah lain yang jauh dan terpencil akan ketinggalan. Jika kita tinjau Riau dengan penduduknya 750.000 jiwa dengan kekayaan alamnya seperti minyak, kayu, rotan dan lain-lain serta rakyatnya yang mempunyai aktifitas, maka Riau dapat dijadikan satu provinsi.”²

² Sejarah Riau, Muchtar Lutfi, 1977:644.

Dari sambutan yang diberikan Gubernur Sumatera Tengah dalam sidang kongres hari pertama ini, jelas bahwa dia sangat mendukung perjuangan masyarakat Riau. Kongres Rakyat Riau itulah yang menjadi puncak perjuangan tokoh-tokoh masyarakat Riau.

Tokoh-tokoh pejuang dan perjuangan masyarakat Riau itu dapat kita jumpai dalam buku sejarah perjuangan bangsa di daerah ini, seperti *Menegakkan Merah Putih di Riau, Revolusi Fisik di Daerah Riau, Sejarah Kebangkitan Daerah Riau, Pengalaman dan Pengorbanan Pejuang-pejuang 45 di Riau* dan lain-lain. Tokoh-tokoh tersebut adalah: M. Abdullah Hasan, Muctar Husin, M. Jakob dan H. Abu Rauf (presidium). Umar Amin Husin, Wan Ghalib, H. Muhammad, Gulmat Siregar (pemerasarana). H. Abdul Hamid Yahya, H.M. Amin dan T. Kamarulzaman (P3R). Dari tokoh wanita Rohana Said dan Misbah Taib. Sedangkan H. Ma'rifat Marjani duduk di Parlemen RI mewakili seluruh masyarakat Riau di Jakarta.³

Dalam penelitian ini penulis menginventarisasikan, menyusun, mendokumentasikan dan mendeskripsikan seorang tokoh pejuang di daerah Riau yaitu, H. Ma'rifat Marjani, tanpa mengesampingkan arti perjuangan tokoh Riau yang lain. Penulis akan mengungkapkan peranan yang beliau lakukan dalam mendirikan Provinsi Riau. Karena pada masa itu beliau menjabat sebagai anggota DPR-RI dari Riau yang dapat menyampaikan aspirasi rakyat Riau pada pemerintah pusat. Selain itu juga terdapat suatu badan penghubung yang dapat bekerjasama antara P3R di Pekanbaru. Badan penghubung adalah prajurit yang berjuang di garis depan sedangkan P3R di Pekanbaru pada saat itu merupakan motor kekuatan.

“UU No.61/1958 sebagai pengganti dan berasal dari Undang-Undang Darurat No.61/1958 telah memberi kesempatan kepada daerah Riau dan Jambi untuk *self sporting* dan untuk membangun daerahnya. Undang-Undang No.61/1958 telah menjadikan daerah Sumatera Tengah tiga daerah Swatantra Tingkat 1, Sumatera Barat, Riau dan Jambi.”⁴

Dalam pidato Ma'rifat Marjani, hari Rabu 11 April 1956 pukul 19.30 WIB yang intinya berisikan, keinginan membuka persoalan Riau dengan tidak mengurangi penghargaan pada persoalan-persoalan daerah lain dalam lingkungan Indonesia yang luas. Usulan-usulan beliau lewat pidatonya di Parlemen RI ini telah membuka mata bagi pemerintah pusat

³ Sejarah Riau, Muctar Lutfi, 1977:644.

⁴ *Realisasi Propinsi Riau-Jambi*, Ma'rifat Marjani, 1959:3.

untuk mempertimbangkan keinginan yang selama ini rakyat Riau inginkan, selanjutnya mendirikan Provinsi Riau.

Untuk mempertajam masalah penelitian yang akan diamati,⁵ analisa sejarah bisa ditujukan individu, gagasan, pergerakan, atau suatu institusi.

Pembahasan

Riwayat Hidup Ma'rifat Marjani

Orang tua Ma'rifat Marjani berasal dari Mudik Ulo sekarang Indragiri Hulu. Bapaknya bernama Marjani dan ibunya bernama Khalimatus Sya'diyah. Kedua orang tuanya berasal dari desa yang sama karena pada saat itu jarang ada diantara remaja laki-laki maupun wanita yang mencari istri atau suami dari desa lain. Kehidupan orang tuanya sepanjang hidupnya tidak pernah keluar daerah lain maupun keluar negeri dalam arti merantau, tetapi menetap di Mudik Ulo sampai meninggal dunia. Pekerjaan orang tuanya adalah bertani dan berkebun.

Pernikahan Marjani dengan Khalimatus Sya'diyah dikaruniai empat anak, Ma'rifat Marjani sendiri adalah anak ke-3 dari empat bersaudara. Kehidupan sehari-harinya tidak ada bedanya dengan masyarakat setempat di Mudik Hulu yang hidup dari pertanian tradisional.

1. Masa Kecil dan Remaja

Ma'rifat Marjani dilahirkan di Mudik Hulu (Indragiri) tepatnya pada tanggal 15 Agustus 1917. Masa kanak-kanak ia tidak jauh bedanya seperti anak-anak lain yang tinggal di kampung. Pada usia 6 (enam) tahun dia masuk SD yang pada waktu itu bernama Sekolah Rakyat (SR) di Taluk Kuantan, tamat pada tahun 1931. Pada waktu itu Indonesia di bawah jajahan Belanda sehingga proses belajar mengajar tidak dapat dilaksanakan secara rutin. Kemudian pindah ke Teluk Bayur tepatnya di Maninjau untuk mengikuti Sekolah Agama Madrasah Tarbiyah Islamiyah selama 7 tahun, karena sulitnya mendapat ilmu pada waktu itu sehingga dia selalu berhenti dan masuk kembali untuk belajar. Belanda tidak menyediakan fasilitas pendidikan, sarana dan prasarana yang cukup untuk anak-anak Indonesia karena tidak menginginkan putra-putri Indonesia menjadi pandai, barulah pada tahun 1943 dia menamatkan pendidikannya pada Sekolah Agama Tarbiyah Islamiyah.

2. Pendidikan dan Keluarga

Dalam usia 28 tahun Ma'rifat Marjani menikah dengan Fatimah Hadi tepatnya bulan Desember 1945 di Bukit Tinggi. pernikahannya

⁵ Pengantar Metodologi Penelitian Pendidikan, Senapiah Faisal, 1982:383.

nampak, terutam sekali tentang sistem politik kenegaraan yang juga akan diperjuangkan di konstituante. Untuk melihat bagaimana corak dan produk pemikiran PERTI menghadapi masalah di atas, dapat kita telusuri melalui dua bentuk, yaitu pemikiran yang berkembang dan muncul menjadi keputusan kongres, dan pemikiran yang dikembangkan sendiri oleh beberapa tokoh PERTI. Ringkasnya, keputusan kongres dan pemikiran tokoh.⁶

Kongres PERTI setelah masa revolusi diadakan di Bukit Tinggi pada tanggal 20-25 Mei 1950. Secara keseluruhan kongres ini menghasilkan beberapa keputusan:

1. Program Azasi Partai
2. Program Perjuangan
3. Susunan pucuk pimpinan

Konsep di atas dilengkapi dengan keputusan pada kongres berikutnya yang lebih detail dari apa yang telah diputuskan. Pada intinya, PERTI tetap menginginkan negara Indonesia yang berdasarkan Islam dengan nama *AL-INDONESIA AL-JUMHURIYAH AL-ISLAMIAH AL-INDONESIA* (Negara Republik Islam Indonesia), dan konstitusi negara tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Dasar negara berdasarkan Islam
- b) Kedaulatan negara di tangan Tuhan yang dilaksanakan oleh Waliu Amri
- c) Bentuk negara kesatuan dengan stelsel desentralisasi
- d) Bentuk pemerintahan berbentuk republik
- e) Sifat pemerintahan demokratis
- f) Dasar-dasar negara hukum dalam negara adalah : Kitabullah, Hadist, Ijma' Umma dan Qiyas.
- g) Alat-alat perlengkapan negara terdiri dari kepala negara, kabinet, dewan Permusyawaratan Rakyat, mahkamah, hak-hak asasi yang harus dilindungi oleh negara, ekonomi dan pertahanan negara.

Usaha-usaha Ma'rifat yang sangat berharga ketika menjabat Ketua Komisariat Perti Indragiri, adalah menyadarkan masyarakat dalam usaha agar masyarakat tidak merasa keberatan untuk mengorbankan harta bendanya, dan kalau perlu dengan nyawa sekalipun demi tegaknya Republik

⁶ *Pemikiran Politik Perti 1945-1970*, Alaidin Koto, 1997:189.

Indonesia yang dicintai ini. Organisasi Tarbiyah Islamiyah yang dipimpin Ma'rifat Marjani dan Organisasi Muhammadiyah yang dipimpin Buya Hassan Arifin, sama-sama berada pada masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia di Kecamatan Kuantan Mudik. Kedua organisasi ini bersatu padu untuk menggerakkan anggotanya membantu biaya perang, nama tokoh-tokoh yang memperhubungkan daerah pedalaman republik dengan daerah luarnya yaitu daerah pendudukan Belanda guna mendapatkan input (masukan) bagi kepentingan rakyat, yaitu Intan Husin dan Umar Duyun.

Demikian perjuangan para gerilyawan RI dan kelompok PERTI yang di pimpin Ma'rifat berjuang untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Perjuangan dalam Parlemen Republik Indonesia pada tanggal 2 Maret 1956 pengumuman hasil pemilihan umum DPR di depan suatu rapat umum bertempat digedung Olahraga Selatan Jakarta. Menurut pengumuman itu, PNI mendapat 57 kursi, Masyumi 57 kursi, NU 45 kursi, PKI 39, PSII 8, Parkindo 8, Partai Katolik 6, PSI 6, Perti 4, IPKI 4, GPP 2, PRN 2, Persatuan Pegawai polisi 2, Murba 2, Partai Buruh 2, PRI 2, PRIM 1, Akul 1, Acoma 1, PPTI 1, Persatuan Rakyat Desa 1, R. Soedjono Prawirosoedarso 1, PIR (W) 1, PIR (in) 1, Permai 1, Baperki 1, Grinda 1, dan Persatuan "DAYA" 1. Dengan demikian jumlah kursi yang dibagikan 257 sedangkan 3 kursi disediakan untuk wakil rakyat Irian Barat sehingga jumlah keseluruhannya 260 kursi.⁷

Ma'rifat terpilih menjadi anggota Parlemen RI mewakili Riau, dari Partai PERTI setelah partai-partai lain tidak mendapatkan kursi. Tugas yang dibawa Ma'rifat dalam melaksanakan tugasnya di Parlemen RI adalah menyampaikan aspirasi rakyat Riau di Parlemen RI. Jalan ini ditempuh setelah perhatian terhadap rakyat Riau oleh Pemerintah Nasional Indonesia belum banyak tanggapan, terbukti dengan soal pendidikan, ekonomi tidak banyak mengalami perubahan dari masa pejahahan. Justru itu para pemuda Riau di dalam kongresnya di Pekanbaru pada tanggal 17 Oktober 1954 dicetuskannya ide menuntut Riau dijadikan Otonomi Tingkat 1 (provinsi) karena mengingat kurangnya perhatian terhadap Riau selama Indonesia Merdeka. Keinginan dan cita-cita Riau dijadikan provinsi tersendiri itu sampai kepada klimaknya pada akhir bulan Januari 1956 di dalam kongres Rakyat Riau di Pekanbaru, yang melahirkan resolusi diiringi oleh satu nota penjelasan.

⁷ *Realisasi Propinsi Riau-Jambi*, Ma'rifat Marjani, 1959:31.

Didalam memperjuangkan Provinsi Riau, disegenap jurusan selalu menghadapi seribu satu kesulitan, tetapi dengan keteguhan hati dan penuh keyakinan, para pemimpin dan rakyat Riau yang tergabung di dalam ikatan cita-cita yang satu itu bekerja dan berjalan terus, dengan mengingat pesan pahlawan besar Hang Tuah: "Tidak melayu hilang di bumi, pawang mati tidak terkubur, bahasa menunjukkan bangsa", akhirnya rakyat Riau sampai juga kepada pulau cita-cita yaitu dengan keluarnya Undang-undang darurat No.19/1957, realisasinya akan dilaksanakan dengan secepat mungkin.

Dalam perjuangan menuntut Otonomi Tingkat 1 (Provinsi Riau) terjadi kerjasama antara Badan Penghubung Panitia Persiapan Propinsi Riau (P3R) dengan Ma'rifat yang duduk di Parlemen RI. Badan penghubung terdiri dari: Ketua Wan Ghalib, sekretaris A. Djalil M, anggota Mhd. Sabir, Ali Rahasan, Azhar Husni, Hasan Ahmad, Umar Amin Husni, T. Arief, Dt. Bandaro Sati, Nahar Efendi, dan Kamarudin R.

Anggota Parlemen RI yang mewakili Riau satu-satunya adalah Ma'rifat Marjani. Kerja sama yang digalang dalam menyampaikan aspirasi rakyat Riau pada waktu itu, adalah melalui pidato-pidato di parlemen yang intinya menuntut diberikannya Otonomi Tingkat I. Bisa dikatakan Panitia Persiapan Provinsi Riau sebagai pembuat makalah sedangkan Ma'rifat sendiri sebagai penyampainya di parlemen.⁸

....Saya ini seorang yang datang dari daerah Riau, sebuah daerah yang jauh letaknya dari pusat ini. Oleh karena itu ingin saya membuka persoalan Riau ini, dengan demikian mengurangi penghargaan saya kepada persoalan-persoalan daerah lain dalam lingkungan Indonesia yang luas ini. Daerah Riau di Sumatera Tengah, sebagai yang sudah diketahui oleh pemerintah terdiri dari dua bagian yang berlain keadaannya. Sebagian terletak di daratan pulau Sumatera, yang meliputi Kabupaten Kampar dan Indragiri, dan sebagian lagi terdiri beribu-ribu pulau yang terletak dipantai Timur Sumatera, meluas sampai ke muka pulau Singapura dan bahkan sampai masuk jauh ketengah-tengah lautan Tiongkok sebeah Selatan...⁹

Pada pidatonya tanggal 15 Oktober 1956 pukul 19.30 WIB dijelaskan bahwa tuntutan Provinsi Riau dan Jambi adalah logis karena

⁸ Wawancara dengan Wan Ghalib, tanggal 28 Agustus 1999 di Balai Adat Melayu Riau.

⁹ *Realisasi Propinsi Riau-Jambi*, Ma'rifat Marjani, 1959:49.

pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil berhak mengurus rumah tangganya sendiri (otonom), dengan bentuk susunan pemerintahan ditetapkan dengan Undang-Undang. Dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dan dasar perwakilan dalam sistem pemerintahan negara otonom, selain menitik beratkan pandangannya kepada geografis semata-mata. Tuntutan daerah Riau dijadikan satu provinsi yang berotonom sudah memakan waktu yang sudah lama, pada tanggal 31 Januari sampai 2 Februari 1956 hasrat dan cita-cita itu dirumuskan dalam satu resolusi, Kongres Rakyat Riau (KRR) di Pekanbaru yang mana resolusi tersebut sudah disampaikan kepada kabinet, parlemen, gubernur, dan semua instansi yang dianggap perlu oleh Panitia Persiapan Provinsi Riau di Pekanbaru. Dengan perhatian pemerintah sepenuhnya terhadap tuntutan Provinsi Riau itu, hendaknya tidak diabaikan dan kebijaksanaan pemerintah dalam hal UU No.22/1946 pemerintah belum menjelaskan satu ukuran untuk menentukan pembentukan satu provinsi yang sangat diharapkan.

Pemerintah pusat setelah didesak oleh daerah yang terus-menerus sehingga pemerintah sendiri menganggap perlu Provinsi Riau dan Jambi dijadikan provinsi sendiri. Memandang letak geografis dan bentuk kebudayaan yang berbeda akhirnya pemerintah pusat melalui memori penjelasan mengenai usul Undang-Undang penetapan "Undang-Undang Darurat No.19/1957 tentang pembentukan daerah-daerah Suatantra tingkat satu Sumatera Barat, Jambi, dan Riau" (Lembaran Negara Tahun 1957 No.75) sebagai Undang-Undang yang isinya:

Dengan peraturan pemerintah pengganti UU No.4/1950 pemerintah RI (Djogjakarta) telah membentuk Provinsi Sumatera Tengah, yang meliputi daerah-daerah administratif Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi berdasarkan Undang-Undang RI (Dogjakarta) No.22/1948 tentang pokok pemerintah daerah.

Kedua aturan perundangan tersebut oleh pemerintah RI Serikat dan kemudian oleh Pemerinta RI sekarang ini dilanjutkan sebagai perundangannya sendiri. Dengan berlakunya Undang-Undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah yang baru, yaitu UU No.1/1975 sejak saat pengundangannya tanggal 1 Desember 1957 Provinsi Sumatera Tengah tersebut secara otomatis dianggap sebagai daerah tingkat 1 Sumatera Tengah berdasarkan UU No.1/1957 tersebut (vide pasal peralihan pasal 37 ayat 1 UU No.1/1957).

Dalam kenyataannya pembentukan daerah tingkat 1 Sumatera

Tengah sebagai suatu kesatuan otonom, yang dilakukan pada tahun 1950 berhubung dengan perkembangan-perkembangan baru dalam masyarakat sejak itu. Dirasakan tidak lagi memuaskan rakyat dari daerah-daerah yang diliputinya.

Rakyat dari daerah-daerah Keresidenan Riau dan Jambi dalam beberapa tahun terakhir telah mengajukan tuntutan-tuntutan dalam bentuk mosi, resolusi dan pernyataan-pernyataan lain. Baik dengan perantaraan partai politik, maupun melalui badan-badan khusus yang dibentuk pada waktu itu, kesemua badan-badan ini pada tahap terakhir bergabung dengan Kongres Rakyat Daerah Riau dan Jambi, agar daerah-daerah administratif Keresidenan Riau dan Jambi masing-masing dibentuk sebagai daerah Swatantra Tingkat I Riau dan Jambi.

Tuntutan-tuntutan ini disertai beberapa alasan tentang ketidakpuasan dari rakyat daerah-daerah yang bersangkutan terhadap bentuk lama Daerah Tingkat I Sumatera Tengah antara lain:

- a) Sulit dan jauhnya perhubungan antar ibu kota, kabupaten dalam keresidenan Riau, Jambi dan ibu kota provinsi.
- b) Karena sulitnya hubungan ini daerah-daerah kabupaten yang jauh letaknya dari ibu kota provinsi ini tidak mendapatkan layanan selayaknya dari pemerintah provinsi.
- c) Berhubung dengan itu daerah-daerah yang bersangkutan ingin berhubung langsung dengan pemerintah pusat.

Setelah pemerintah mempelajari bahan-bahan yang diajukan dan meneliti faktor-faktor politis, sosial, ekonomi, geografis, historis, kebudayaan dan lain-lain. Pemerintah berpendapat bahwa dapat dipertanggungjawabkan apabila tiga daerah administratif keresidenan Sumatera Barat, Riau dan Jambi merupakan wilayah Sumatera Tengah lama masing-masing dibentuk menjadi daerah Tingkat I. Pada waktu itu tidak boleh dilupakan tuntutan dari rakyat wilayah Kerinci sejak puluhan tahun, di mana ditilik dari sudut ekonomi dan kebudayaan memang merupakan satu kesatuan yang lebih bulat, apabila digabungkan dengan wilayah Keresidenan Sumatera Barat.

Berhubung dengan itu pemerintah mengambil kesimpulan, bahwa telah sewajarnya dibentuk:

- a) Daerah Tingkat I Sumatera Barat yang wilayahnya meliputi Keresidenan Sumatera Barat dikurangi dengan apa yang disebut wilayah Kerinci yaitu kecamatan-kecamatan Kerinci Hulu, Kerinci Tengah dan Kerinci Hilir.

- b) Daerah Tingkat I Jambi, yang wilayahnya meliputi Keresidenan Jambi ditambah dengan Kerinci.
- c) Daerah Tingkat I Riau, yang wilayahnya meliputi Keresidenan Riau.

Suasana politik di tanah air pada waktu itu, masih dalam suasana kacau di mana gerakan Dewan Banteng masih terus bergerilya di tanah air. Pemerintah menganggap perlu bertindak cepat untuk memenuhi hasrat murni dari rakyat di daerah, yang menuntut ekonomi luas, dilihat dari sudut berbagai faktor seperti uraian di atas telah sewajarnya dipenuhi. Oleh karena itu pemerintah telah menyimpang dari prosedur biasa dan mempergunakan haknya seperti termaktub dalam pasal 96 Undang-Undang Dasar Sementara (UUUDS) Republik Indonesia, yaitu membubarkan Dewan Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah dan membentuk wilayah tiga Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi dengan Undang-Undang Darurat No.19/1957. Berdasarkan pasal 97 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Undang-Undang Darurat ini perlu ditetapkan sebagai undang-undang agar bentukan-bentukan itu mempunyai dasar hukum yang kuat.¹⁰

Setelah dalam waktu enam tahun berjuang menuntut dijadikan Riau Provinsi sendiri, akhirnya pemerintah mengabulkan keinginan rakyat Riau dengan ditetapkannya Undang-Undang Darurat No.19/1957 kemudian diundangkan dalam Undang-Undang No.61/1958. Dalam Undang-Undang itu telah ditetapkan pembentukan daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Riau dan Jambi, jo lembaran negara No.75/1957. Daerah Swatantra Tingkat I Riau meliputi wilayah daerah-daerah Swatantra tingkat II:

- a) Bengkalis
- b) Kampar
- c) Indragiri
- d) Kepulauan Riau, termaktub dalam Undang-Undang No.12/1956 (Lembaran Negara No.25/1956).
- e) Kotapraja Pekanbaru, termaktub dalam Undang-Undang No.8/1956 no.19.

Dengan surat keputusan Presiden tanggal 27 Februari 1958 No.258/M/1958 telah diangkat Mr. S.M. Amin. Gubernur yang diperbantukan pada Kementrian Dalam Negeri selaku Gubernur Kepala

¹⁰ *Realisasi Propinsi Riau-Jambi*, Ma'rifat M arjani, 1959:91.

Daerah Provinsi Riau yang Pertama. Pelantikan Mr. S.M. Amin sebagai Gubernur Kepala Daerah Provinsi Riau dilakukan pada tanggal 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman.

4. Anggota Penasehat Gubernur

Ma'rifat yang duduk menjadi anggota Parlemen satu-satunya dari Riau, dalam pembentukan Provinsi Riau sebagai penyalur suara-suara rakyat untuk disampaikan pada pemerintah pusat. Setelah Riau resmi menjadi provinsi sendiri Ma'rifat juga tidak dilupakan, Ma'rifat turut serta dalam Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau yang pengangkatannya pada tanggal 9 Juni 1958. Dengan SK Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Juni 1958 No.Des.71/21/34, dan tanggal 7 Agustus 1958 No.Sek/13/33 dibentuk Badan Penasehat Gubernur.¹¹

Badan Penasehat Gubernur ini terdiri dari tujuh orang sebagai anggota, masing-masing adalah :

1. R. H.M. Yunos
2. Whan Ghalib
3. D.M. Yanur
4. H. Syamsuddin Ibrahim
5. Ma'rifat Marjani
6. Suni Pahar
7. T. Mahmud Anzam

Badan ini dilantik pada tanggal 21 Juli 1958 bertempat di Gubernuran Tanjung Pinang oleh Gubernur Kepala Daerah Riau. Dalam Pelantikan ini turut hadir sejumlah pejabat-pejabat negara seperti, Penguasa Perang Daerah Kepulauan Riau, Letnan Kolonel H.P. Simanjuntak, Residen d/p Mr. Sis Cakraningrat, Kepala Daerah Kepulauan Riau Mahmud.¹²

Pidato pelantikan diucapkan oleh Gubernur Riau, sedangkan sambutan atas pidato ini diucapkan oleh anggota Badan Penasehat R.H.M. Yunos, atas nama Badan Penasehat tersebut. Pidato pelantikan Gubernur Riau adalah sebagai berikut:

Saudara-saudara hadirin yang terhormat: atas saya, oleh Yang Mulia Menteri Dalam Negeri telah diletakkan kewajiban untuk dan atas nama beliau, melaksanakan Pelantikan Badan

¹¹ Sejarah Riau, Mughtar Lutfi, 1977:692

¹² Pelantikan dan Pengrasmiian Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau, 21 Juli 1958:8

Penasehat Gubernur/Kepala Daerah Riau yang beranggota 7 orang, yaitu saudara-saudara R.H.M. Yunos, Syamsuddin Ibrahim, Daeng M Yanur, Wan Ghalib, Ma'rifat Marjani, Suni Pahar dan Mahmud Anzam. Baru saja telah diambil sumpah mereka dan tinggalah lagi pelantikan mereka dan bilaman upacara ini telah selesai, dapatlah mereka dengan resmi melakukan tugas mereka dengan tujuan mengabdikan kepada daerah Riau ini.¹³

Pembentukan Badan Penasehat Gubernur ini untuk membantu Program kerja gubernur yang baru diangkat, badan ini bukan merupakan dewan pemerintah eksekutif melainkan Badan Penasehat. Sebab-sebab dan Pembentukannya adalah:

- a). Kelanjutan usia ini adalah terbatas, badan ini dengan sendirinya akan bubar pada saat terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Swatantra Tingkat I Riau.
- b). Badan ini bukanlah bersipat Dewan Pemerintahan Daerah (eksekutif) melainkan badan penasehat.
- c). Tugas ini adalah memberikan pandangan-pandangan dan nasehat-nasehat (Adveis) mengenai persoalan-persoalan daerah.
- d). Adveis-adveis tersebut dapat diberikan oleh badan ini atas kehendak (inisiatif) sendiri maupun atas permintaan gubernur/Kepala Daerah.

Badan Penasehat ini bukanlah Dewan Pemerintah Daerah ataupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan demikian anggotanya bukan merupakan wakil-wakil dari aliran-aliran partai yang ada di dalam masyarakat Riau, yang menampung dan menyalurkan hasrat hati nurani masyarakat Riau. Usaha-usaha badan penasehat pada pokoknya akan ditujukan kepada mengusahakan segera terwujudnya pengisian daerah otonomi tingkat I Riau. Sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang No.1/1957 dan Undang-Undang No.32/1956, dengan jalan:

- a) Mempersiapkan Pemilihan Umum (Pemilu) daerah
- b) Memperlengkapi alat perlengkapan Daerah Swatantra Tingkat I Riau, termasuk jabatan-jabatan dan personalianya.
- c) Mempertinggi tingkat hidup serta penghidupan rakyat dengan memperlancar barang-barang kebutuhan rakyat primer.
- d) Mengusahakan pembangunan disegenap lapangan
- e) Memperjuangkan segera terlaksananya Undang-Undang No.32/

¹³ *Mengenal Masa Lampau*, Mr.S. Amin, 1978:40.

1956 tentang hal *finantiele Verbouwing* antara daerah dengan pusat.

f) Menggali sumber-sumber keuangan baru.

Setelah Gubernur Kepala Daerah selesai menyampaikan pidatonya, pidato sambutan para anggota Penasehat Gubernur/Kepala Daerah pada hari pelantikan tanggal 21 Juli 1958 disampaikan atas nama seluruh anggota oleh R.H.M. Yunos antara lain:

...Bahwa dengan pelantikan ini pemerintah sudah menunjukkan pengertiannya atas hasrat rakyat Riau, yang sudah memperjuangkannya sejak bertahun-tahun yang lalu. Kami berusaha agar kepercayaan yang telah diberikan kepada kami ini tidak akan tersia-sia, sebaliknya kami sambut dengan sepenuh hati serta segenap kekuatan yang ada pada kami...¹⁴

Sementara itu, Riau daratan baru saja dibebaskan dari pengaruh Dewan Banteng. Kita lihat sebagaimana labilnya keadaan politik di daerah kita, melihat bagaimana gejolak keadaan perekonomian dan sosial di daerah kita. Untuk menormalkan keadaan ini kembali memerlukan ketenangan jiwa dari kita bersama. Dalam keadaan yang begini sulit, jika diantara kita tidak ada toleransi, maka masyarakat kita yang sudah berantakan, sukar kita mengutuhkannya kembali masyarakat kita.

Pengalaman-pengalaman kita dimasa lalu cukup pahit dan tidak sanggup kita menelannya kembali. Hendaknya pengalaman-pengalaman pahit kita dimasa yang lalu itu dapat memberi peringatan pada kita, bagaimana seharusnya kita bersikap dan bertindak. Oleh karena itu seluruh rakyat di daerah Riau ini, hendaknya bersama-sama bahu-membahu menutup lembaran gelap daerah Riau ini dan mulai saat ini menulis sejarah Riau untuk bersama-sama dengan kami mengangkat derajat daerah ketaraf yang sempurna.¹⁵

5. Perjuangan dalam Bidang Pendidikan

Tarbiyah Islamiyah yang awalnya merupakan organisasi sosial yang bergerak mencerdaskan anak bangsa (pendidikan), menangani sekolah-sekolah agama Islam. Ma'rifat Marjani sebagai seorang tokoh masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan agama di Kuantan Mudik pada waktu itu tentunya termasuk orang yang diberi tanggung jawab untuk memimpinya, diharapkan dia dapat mengembangkan ilmu yang diperolehnya selama pendidikan. Organisasi Tarbiyah Islamiyah pada

¹⁴ Djapankab. Kepulauan Riau, 1956:16.

¹⁵ Djapankab. Kepulauan Riau, 1968:24.

mulanya bergerak dalam bidang pendidikan, yang lahir tanggal 5 Mei 1928 di Bukittinggi. Organisasi ini lahir mengikuti Muhamadiyah yang lahir tahun 1912 dan NU tahun 1926. Organisasi Tarbiyah Islamiyah dipelopori oleh seorang ulama besar yaitu Almaghfurlahu Syech Sulaiman Arrasoely bersama sahabatnya Syech M. Jamil Jaho dan Syech Abbas Ladang Lawas Bukittinggi. Tarbiyah memakai mashab Syafei dan paham Ahlulsunnah Waljamaah. Tarbiyah Islamiyah masuk ke daerah Lubuk Jambi (dulu Kabupaten Indargiri) tahun 1930 dibawa oleh Buya Sultan Manjo Arif. Dijemput oleh seorang Penghulu Ninik Mamak yakni Datuk Perpatih Nan Sebatang. Rombongan itu disambut oleh segenap lapisan masyarakat, penghulu-penghulu, ninik mamak, alim ulama dan cerdik pandai. Sampai pada tahun 1950an, organisasi Tarbiyah ini berkembang dengan pesat sehingga disetiap desa mempunyai Madrasah Tarbiyah Islamiyah.

Di Lubuk Jambi hampir setiap desa mempunyai sekolah yang tersebar sebanyak 18 sekolah. Dengan cara mendatangkan buya-buya dari Sumatera Barat seperti Inyak Candung, Syech Sulaiman Arasoely, K.H. Sirajudin Abbas, K.H. Abdul Wahid, Syech Abdullah Wali dari Aceh dan sebagainya. Sekolah yang tersebar itu berada di bawah naungan Tarbiyah Islamiyah yaitu:

1. Kota Pusat
2. Mudik Ulo
3. Banjar Padang
4. Lubuk Ambacang
5. Seberang Petai
6. Sungai Alah
7. Rantau Sialang
8. Petapahan
9. Luwai
10. Cengar
11. Banjar Gundung
12. Gunung
13. Pulau Manau
14. Tebarau Panjang
15. Pabuan
16. Towar
17. Sungai Pinang

Ma'rifat sendiri telah mengajar pada Madrasah Tarbiyah Islamiyah di Kuantan Mudik. Mengingat pada masa itu terjadi Agresi Belanda,

sekolah pada umumnya ditutup. Sekolah baru di buka kembali pada tahun 1950 di kota Rengat.

Tahun 1967 Ma'rifat dan keluarganya pindah ke Pekanbaru, membina Yayasan yang bernama Yayasan Riau Bulletin. Didirikan sejak tanggal 1 November 1959, setahun setelah itu terbentuklah Provinsi Riau yaitu pada tanggal 5 Maret 1958 dengan gubernur pertamanya Mr. S.M. Amin. Ma'rifat diangkat pula sebagai penasehat Gubernur Riau beserta rekannya yang lain. Yayasan Riau Bulletin adalah suatu yayasan yang pertama kali berdiri setelah terbentuknya Provinsi Riau. Yayasan ini merupakan suatu yayasan tertua dalam Provinsi Riau, yang kelahirannya setelah direalisasikan Provinsi Riau dan Jambi oleh Pemerintah pada tahun 1958. Atas prakarsa dua orang tokoh yang mewakili masyarakat Riau dan Jambi, yaitu Ma'rifat Marjani dari daerah Riau dan Rozali dari Jambi berdirilah yayasan Riau Bulletin tersebut. Yayasan Riau Buletin menerbitkan suatu berita mingguan, tetapi realitasnya diterbitkan dua kali sebulan. Penerbitan Riau Bulletin terhenti karena kurangnya dana dan bantuan pemerintah daerah Riau, maka suara Riau Bulletin berhenti penerbitannya.

Beberapa tahun setelah H.R. Soebrantas diangkat menjadi Gubenur Riau pada tahun 1979, Riau Bulletin terbit kembali. Isi dari Riau Bulletin tidak berbentuk surat kabar difokuskan dalam bidang pendidikan. Usaha lainnya adalah mendirikan Madrasah Darul Mutaalimin yang terletak di Jl. Lokomotif No. 44.A Pekanbaru, tahun 1989 jumlah muridnya 60 orang dengan 3 guru agama dan 1 guru kesenian.

Setelah sukses di Pekanbaru, Ma'rifat dan keluarga tidak pula lupa pada kampung halamannya Kuantan Mudik. Di Kuantan Mudik khususnya Desa Sei Alah Hj. Fatimah Hadi membangun Taman pengajian Al-quran Darun Najah. Dengan jumlah santri pertama sebanyak 248 orang. Di Desa Mudik Ulo pula mendirikan Taman Pengajian Al-quran bernama Madrasah Nurul Maarif pada tanggal 1 Desember 1993, dengan jumlah murid 109 orang dan 2 guru. Pengasuh lembaga itu berbentuk suatu badan pengurus yang diketuai Rusli Hakim, dan penasehatnya adalah kepala desa serta perangkatnya. Pembangunan sepenuhnya berada di bawah Yayasan Riau Bulletin.

6. Perjuangan Dalam Bidang Politik

Tahun 1945 Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan kesempatan pada organisasi-organisasi yang ada untuk mendirikan partai politik. Tarbiyah yang ada pada mulanya hanya bergerak pada bidang

pendidikan dan keagamaan ikut dalam partai politik, sesuai dengan pernyataan ini:

Roda sejarah yang mulai berjalan dengan Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945 dan keluarnya maklumat Pemerintahan RI Nomor X tanggal 3 September 1945 yang mengilhami berdirinya partai-partai politik maka persatuan Tarbiyah Islamiyah ini terpanggil untuk menjadi partai politik Islam. PERTI sempat mendirikan lasykar-lasykar Muslimin (Lasymi) dan Lasykar Muslimat yang kemudian lebur kedalam TNI.¹⁶

Sesudah menjadi partai politik, kegiatan PERTI dalam bidang pendidikan terhenti. Hal ini disebabkan guru-guru sudah disibukkan dengan kegiatan dan juga sedang menghadapi Agresi Belanda I, karena pergerakan Belanda hanya dirasakan di daerah pesisir pantai Sumatera. Maka organisasi PERTI menyebarluaskan Paham Ahlul Sunnah Waljamaah dan Mashab Syafei. Ma'rifat sebagai komisariatnya berusaha menyadarkan masyarakat agar rela berkorban harta dan bendanya, dan kalau perlu dengan nyawanya demi tegaknya Republik Indonesia.

Belanda yang berkedudukan di Kepulauan Riau, yaitu sepanjang pesisir timur daerah Riau, jadi setelah Agresi Belanda II, Lasykar Muslimat Indonesia sebagai tenaga tempur satu batalyon di Indragiri, sedangkan Komandan Lasykar adalah Hamidi Saad dari Lasykar Muslimat sebagai palang merah diketuai oleh Ma'rifat Marjani dan istrinya Fatimah Hadi sebagai Tituler Lasymi yang dilantik oleh Sofyan Sirat dan Syamsudin Zakaria. Karena Lasykar ini adalah sebagai tenaga untuk perjuangan di daerah. Lasykar ini didirikan oleh PERTI pada tanggal 24 Desember 1945, dengan pemimpinnya Sofyan Sirait.¹⁷

Sebagai suatu organisasi, biaya ditanggung sepenuhnya oleh anggota, para anggota sibuk mencari dana untuk kelancaran organisasi. Markas PERTI di daerah Sentajo yaitu di rumah Muhammad Samin orang tua Prof. Drs. Suwardi. Lasymi yang baru dibentuk oleh PERTI mengirim utusan dari Indragiri ke Bukittinggi yaitu markas Devide Lasymi, dari Lasymi beberapa pemuda untuk dilantik sebagai komandan dikampungnya masing-masing:

1. Zainuddin Harus dari Mudik Ulo
2. Ahmad Tambang dari Lubuk Ambacang

¹⁶ Dewan Pimpinan Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah, 1994:2.

¹⁷ Tinjauan penyusunan markas ABRI, 1988:55.

3. Jahalim dari Pucuk Rantau Indragiri
4. Rantau Hamid dari Lubuk Jambi
5. Ma'asid dari Pesajian Simpang Kiri
6. Simpan dari IV Koto Gunung
7. M. Tawab dari Sintajo
8. M. Sabar dari Kopah
9. Hasyim dari Sibarukan
10. Ya. Muhammad dari Benai
11. Zainudin dari Pangean
12. Saat dari Lugas Tanah Datar
13. Syamsudin Ongku Gomuk dari Baserah
14. M. Jaya dari Inuman
15. Umar Mana dari Cerenti
16. M. Thalib dari Kari

Mereka kembali ke Indragiri, masing-masing membentuk satu kompi Lasymi. Mereka bekerjasama dengan Hisbullah dan Sabilillah dari organisasi Muhamadiyah, dan menggabungkan diri di bawah Komando Tentara Nasional Indonesia (TNI). Di bidang politik dibentuk Komite Nasional yang diketuai oleh Dr. Ilyas, kemudian diganti oleh Umar Amin Husein. Wedana yang pertama adalah Syamsudin kemudian diganti oleh Raja Samin.

Kerjasama Komite Nasional Indonesia dengan pemerintah yang menyebabkan perubahan Pemerintah Rantau Kuantan dari pemerintahan orang Gedang yang sembilan ke Wali Negeri yang diangkat dan dipilih oleh rakyat. Hal ini dapat disebut Revolusi ke dalam dan Ma'rifat sebagai anggotanya. Nama Lasymi diganti dengan kepandaian Al Anshor, kata Al Anshor diambil dari kata sekelompok masyarakat Madinah yang menyambut kedatangan Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah waktu pertama kali hijrah.

Tahun 1950-1955 perkembangan Tarbiyah Islamiyah ini sangat pesat sekali, di daerah terdapat sekolah yang dikelola oleh organisasi ini. Ma'rifat Marjani beserta istrinya dekat dengan masyarakat, baik organisasi maupun partai-partai yang sudah ada pada waktu itu. Karena banyaknya simpatisan kepada mereka sehingga pemilihan umum pertama tahun 1955 Ma'rifat terpilih menjadi anggota parlemen pertama kalinya mewakili Sumatera Tengah.

Semenjak terpilihnya Ma'rifat sebagai anggota parlemen, maka tahun 1956 Ma'rifat sekeluarga pindah ke Jakarta menetap di daerah

Matraman Dalam. Mereka sengaja tidak mendiami kompleks DPR di Grogol karena mengingat rakyat daerah yang kebanyakan beratapkan daun rumbia dan nipah.

Pengalaman-pengalaman Ma'rifat Marjani dalam organisasi:

1. Ketua PERTI Rantau Kuantan tahun 1945
2. Ketua Lasykar Muslimin Indonesia tahun 1946
3. Anggota Cui Sangi In tahun 1943-1945
4. Anggota Parlemen RI tahun 1955
5. Anggota Badan Penasihat Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau tahun 1958
6. Pemimpin Yayasan Riau Bulletin tahun 1959

Ma'rifat Marjani meninggal 15 Maret 1989 namun jasa-jasanya tetap dikenang dan diabadikan, sedangkan Yayasan Riau Bulletin tetap diteruskan oleh keluarganya. Sekarang ini berkat bantuan pemerintah daerah dan para dermawan, murid-murid pengajian telah mendapatkan fasilitas yang memadai, seperti telah tersedianya gedung sekolah. Berkat binaan istrinya dan anak-anak yang ditinggalkan Yayasan Riau Bulletin terus berkembang sampai saat ini.

Kesimpulan

Sebagai kesimpulan yang dapat penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Ma'rifat Marjani adalah tokoh masyarakat Riau yang pernah berjuang di daerah Kuantan Mudik dalam perang kemerdekaan.
2. Tahun 1946 Ma'rifat Marjani menjadi Ketua Lasykar Muslimin di Kuantan Kabupaten Indragiri.
3. Ma'rifat Marjani adalah ketua komisariat PERTI untuk daerah Indragiri pada tahun 1945 yang menjadi permulaan politik bagi dirinya sekaligus terpilih anggota Parlemen RI pada Pemilu tahun 1955.
4. Peran Ma'rifat Marjani sebagai pelopor berdirinya Provinsi Riau adalah penyampai aspirasi masyarakat Riau lewat parlemen di mana ia telah duduk sebagai anggota.
5. Jika ditinjau dari perjuangan mendirikan Provinsi Riau Ma'rifat Marjani tidak sendiri melainkan bekerjasama dengan seluruh masyarakat Riau yang menginginkan daerah otonomi.
6. Menyatukan aspirasi yang datang dari masyarakat kemudian disampaikan oleh Ma'rifat Marjani melalui pidato-pidatonya di Parlemen RI yang menggugah hati pemerintah pusat dengan

kesungguhan dan keyakinan pemerintah pusat ternyata luluh mengabdikan keinginan masyarakat Riau untuk membentuk Daerah Otonomi Tingkat I Provinsi Riau.

Daftar pustaka

- Alaiddin Koto., *Pemikiran Politik Perti 1945-19770*, Nyimas Mutiara, Jakarta, 1997.
- Amin. S.M. Mr., *Mengenang Masa Lampau*, Arga Binangun Grafika, Pekanbaru, 1957.
- Badan Penasehat Gubernur Kepala Daerah Swatantra Tingkat I Riau, Djapenkab, Kepulauan Riau 1958.
- Daljoini. N., *Dasar-dasar Ilmu Pengetahuan Sosial*. Alumni, Bandung, 1994.
- Depdikbud., *Metodelogi Penelitian*, Universitas Tebuka, Jakarta, 1985.
- Sejarah *Riau Proyek Investasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah*, Jakarta, 1986.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Tim Penyusun Kamus Pusat Penelitian dan Pengembangan Bahasa, Jakarta, 1988.
- Dewan Perwakilan Rakyat Rapat Pleno Tertutup ke-2 Tentang Pembaharuan Susunan Dewan Perwakilan. 7 Maret 1960.
- Gottschal Louis, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nugroho Notosusanto, Universitas Indonesia, 1975.
- D.G.E. Hall, (Terjemahan) Soewarsih, *Sejarah Asia Tenggara*, Usaha Nasional, Surabaya, 1986.
- Hasan Basri., *Remaja Berkualitas*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1998.
- _____, *Menegakkan Merah Putih di Riau*, Jakarta, 1984.
- Karmidi Andri., *Penumpasan Pemberontakan PRRI di Kuwantan Mudik 1958*, Universitas Riau, Pekanbaru, 1994.
- Ma'rifat Marjani, *Realisasi Propinsi Riau - Jambi*, Pustaka Nyiur Melambai, Jakarta, 1959.
- Muchtar Lutfi., *Sejarah Riau*, Pekanbaru, 1977.
- Memori Pelaksanaan Tugas Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau Periode 1993-1998.
- Sumadi Suryabrata., *Metodelogi Penelitian*, Universitas Gajah Mada, Raja Grafika Persada, Jakarta, 1983.
- Taufik Abdullah., *Sejarah Lokal di Indonesia*, Gajah Mada University, Yogyakarta, 1990.
- The Liang Gie., *Pertumbuhan Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia*, Gunung Agung, Jakarta, 1968.